



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah konflik, media memiliki peran baik membantu menyelesaikan sebuah konflik atau memperkeruh suatu konflik. Hal itu disebut Shoemaker terjadi karena adanya proses interpretasi dan pemberitaan dari sebuah fakta yang dilakukan oleh jurnalis (dikutip dalam Rusdi, 2012, p. 389). Karenanya, menurut Wolsfed peran jurnalis dalam mempromosikan perdamaian dalam sebuah konflik sangat signifikan (dikutip dalam Rusdi, 2012, p. 389).

Sementara dalam meliput krisis, media cenderung tidak akurat karena mengandung desas-desus menurut Putra GN (dikutip dalam Sumartono, 2012). Dynes (dikutip dalam Sumartono, 2012) menyebut bahwa media akan cenderung membesar-besarkan suatu kejadian ketika meliput sebuah krisis. Trijono L menyebut jika media cenderung hanya meliput pada aspek konfliknya saja seperti pembunuhan, penembakan, pembakaran, pembantaian, dan lain-lain (dikutip dalam Sumartono, 2012).

Di Indonesia praktik jurnalistik yang diterapkan dalam meliput sebuah konflik sering tidak lepas dari sentimen agama (Pitaloka, 2017, para. 10). Hal tersebut disebut Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International ketika menjelaskan bagaimana jurnalis meliput konflik Ahmadiyah di Cikeusik. Usman

menyebut bahwa sentimen tersebut terlihat ketika ada anggapan bahwa wajar jika ada perlakuan buruk terhadap penganut aliran Ahmadiyah karena mereka dianggap sesat (Pitaloka, 2017, para. 10).

Desi Fitriani yang merupakan senior produser Metro TV menyebut bahwa ada tekanan dari pihak militer terhadap jurnalis ketika meliput sebuah konflik (Pitaloka, 2017, para. 4). George Junus Aditjondro, Konsultan Penelitian dan Penerbitan Yayasan Tanah Merdeka juga menyebut bahwa jurnalis di Indonesia lebih banyak mengandalkan informasi yang diberikan oleh pihak elit seperti komandan militer (Aditjondro: Jurnalis Cenderung Bias Saat Meliput Konflik, 2004, para. 1).

Pada konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Indonesia, Aditjondro menyebut bahwa jurnalis banyak yang tidak terbebas dari ikatan primordialisme masing-masing sehingga tidak banyak jurnalis yang mencoba untuk mencari penyebab sebagian penduduk Aceh ikut mendukung Gerakan Aceh Merdeka (Aditjondro: Jurnalis Cenderung Bias Saat Meliput Konflik, 2004, para. 1). Jurnalis juga disebut oleh Aditjondro “tak pernah memperdalam kemampuan analitisnya dengan investigasi langsung ke lapangan” ketika meliput konflik (Aditjondro: Jurnalis Cenderung Bias Saat Meliput Konflik, 2004, para. 1).

Aditjondro juga menyebut bahwa jurnalis banyak tidak paham tentang konflik dalam internal aparat penegak hukum. Aditjondro memberi contoh bahwa pengamanan yang dilakukan oleh aparat ketika konflik berlangsung menimbulkan beberapa korban jiwa karena penggunaan senjata yang melebihi kapasitas satuan

pengamanan, sering luput dari sorotan berita (Aditjondro: *Jurnalis Cenderung Bias Saat Meliput Konflik*, 2004, para. 1).

Data dari *Reporters Without Borders* mencatat bahwa Indonesia saat ini berada dalam peringkat ke-124 dalam kategori indeks kebebasan pers di tahun 2018 (RSF, 2018). Dalam laman *Reporters Without Borders*, Presiden Joko Widodo disebut tidak menepati janji kampanyenya karena masih saja terjadi pembatasan akses media untuk meliput di daerah Papua, dan kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis lokal di Papua (RSF, 2018).

Tidak hanya terjadi kepada jurnalis lokal, awak media asing juga disebut dalam laman RSF kerap dituntut secara pidana ketika mereka berusaha meliput kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua (RSF, 2018). Salah satu kasus yang menimpa wartawan media asing yang meliput di Papua yakni Kepala Biro BBC Indonesia Rebecca Henschke. Henschke dipulangkan kembali ke Jakarta pada 3 Februari 2018 setelah diinterogasi selama lima jam oleh intelijen TNI dan Polri, kemudian diperiksa oleh pihak imigrasi selama 24 jam (Apinino, 2018, para. 7). Henschke disebut oleh Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Kolonel (Inf) Muhammad Aidi “telah melakukan pencemaran nama baik dan menyakiti hati kami, karena telah membuat berita bohong atau fitnah, dan sangat berpotensi merusak nama baik kami dan institusi TNI serta negara” (Apinino, 2018, para. 8).

Sebelumnya, Henschke bertugas meliput kekurangan gizi yang terjadi di Kabupaten Asmat. Henschke mengunggah foto makanan dan minuman yang tertumpuk di pelabuhan Feri Agats di sebuah media sosial, kemudian memberi

keterangan bahwa makanan tersebut adalah bantuan untuk penderita gizi buruk. Keterangan foto yang diunggah oleh Henschke secara implisit mempertanyakan kesesuaian bantuan dengan yang dibutuhkan penderita gizi buruk (Apinino, 2018, para. 4-5).

Direktur Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, Ahmad Junaidi memaparkan hasil penelitiannya yang menyebut 45% berita daring yang bertemakan keberagaman, isi kontennya lebih mengarah kepada konflik keberagaman. Hal itu disebut Junaidi karena masih ada jurnalis yang beranggapan *bad news is a good news* (Riski, 2018, para. 2-3). Dalam 45% berita konflik tersebut juga disebut Junaidi banyak yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik dan kaidah panduan berita siber. Berita-berita tersebut banyak yang hanya memberitakan peristiwa dari satu sisi (Riski, 2018, para. 4-5).

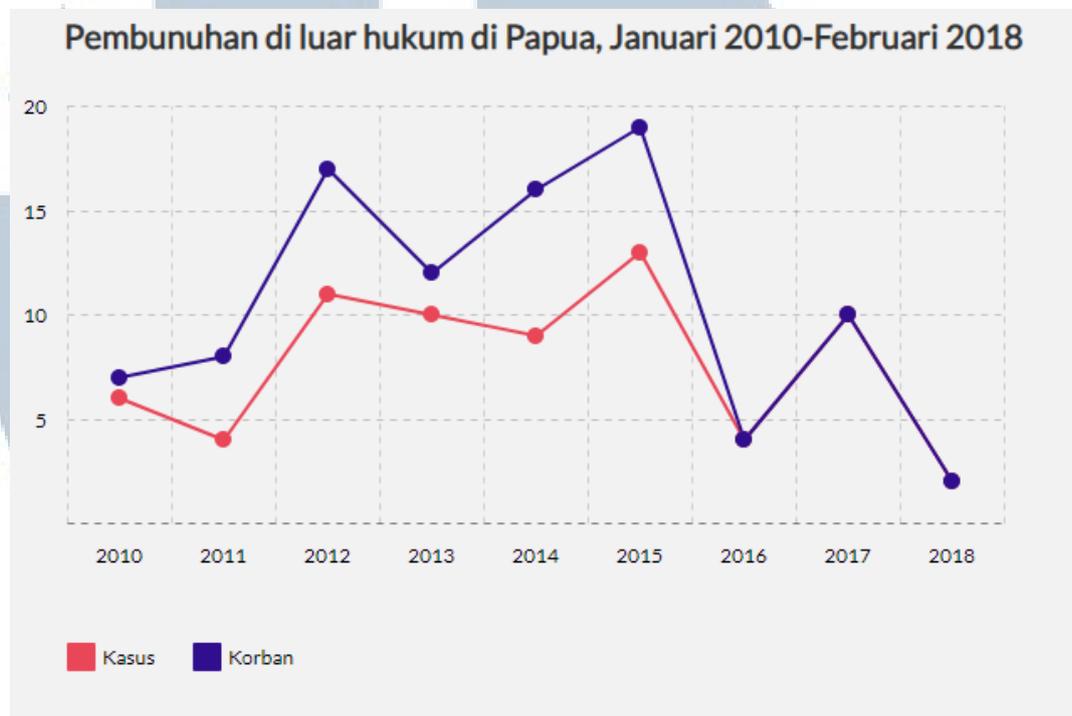
Esther Heidbüchel (2007) mengatakan bahwa konflik Papua muncul pertama kali pada tahun 1963 ketika warga Papua tidak mendapat hak yang pantas dalam berpolitik (Heidbüchel, 2007, p. 35-36). Warga Papua pada masa itu lebih dianggap sebagai objek politik daripada pelaku politik (Heidbüchel, 2007, p. 36). Kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah banyak mengalami penurunan sejak era reformasi, meski turunya Soeharto pada tahun 1998 dan dicabutnya status Daerah Operasi Militer dari Papua (DOM) tidak menghilangkan tindak pelanggaran hak asasi terhadap warga Papua sepenuhnya (Heidbüchel, 2007, p. 36).

Beberapa peristiwa yang menarik perhatian media nasional serta internasional mengenai konflik Papua paska era reformasi yakni kasus di Abepura dan Wamena pada tahun 2000, kasus Wasior pada tahun 2001, kasus pembunuhan di Timika pada tahun 2002, dan Operasi Jayawijaya pada tahun 2004 (Heidbüchel, 2007, p. 36). Sebelumnya, pada tahun 1969 hingga 1998, OPM banyak melakukan penculikan terhadap transmigran dan petugas keamanan setempat untuk memperoleh perhatian internasional (Heidbüchel, 2007, p. 42). Aksi OPM memiliki frekuensi yang cukup tinggi sehingga presiden Soeharto pada waktu itu memberlakukan status Daerah Operasi Militer hingga akhir masa kepemimpinannya (Heidbüchel, 2007, p. 42).

Berdasarkan data milik Amnesty International Indonesia (2018), sejak Januari 2010 hingga Februari 2018, Amnesty mencatat setidaknya ada pembunuhan diluar hukum yang dilakukan aparat pengamanan di Papua dan Papua barat dengan jumlah kasus sebanyak 69, dan korban sebanyak 95 jiwa (Laporan Pembunuhan dan Upaya Penyelesaian Konflik di Papua, para. 8-9). Tahun 2015 juga menjadi tahun dengan jumlah kasus dan korban terbanyak dalam catatan Amnesty International Indonesia.



Bagan 1.1 Grafis Jumlah Korban dan Kasus Pembunuhan di Luar Hukum di Papua



Sumber: beritagar.id, 2018

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2016) juga mencatat jumlah konflik dengan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya (poleksosbud) di Papua berada pada tingkat tertinggi di tahun 2016 dibandingkan provinsi lain (Kemendagri, 2016). Jumlah konflik yang dimiliki Papua sebanyak 11 konflik.

Konflik menurut Fisher merupakan hubungan yang terjadi antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu dengan kelompok, yang mensyaratkan keduanya sama-sama memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda (dikutip dalam Sumartono, 2012). Sumarno menyebut setidaknya ada tiga syarat terjadinya konflik (dikutip dalam Sumartono, 2012). Pertama, adalah perlombaan untuk

mendapatkan sumber daya yang langka. Kedua, yakni sebuah keinginan untuk memiliki otonomi, dan yang ketiga adalah perbedaan seiring berjalan menuju sebuah tujuan.

Media daring dipilih menjadi objek penelitian karena media daring memiliki karakteristik dapat diakses darimana pun (McQuail, 2010, p. 41). Karakteristik yang lain seperti saling terhubung satu sama lainnya membuat proses distribusi berita media daring lebih cepat (McQuail, 2010, p. 41).

Jurnalisme Damai sendiri adalah konsep yang digagas di tahun 1970-an oleh Johan Galtung, yang kemudian dikembangkan konsep praktisnya oleh Annabel McGoldrick dan Jake Lynch pada tahun 1990-an (Rusdi, 2012, p. 390). Menurut Lynch dan Goldrick, jurnalisme damai adalah situasi ketika editor dan reporter membuat sebuah keputusan tentang bagaimana sebuah kejadian diliput dan diberitakan agar memberikan dampak luas kepada masyarakat untuk memilih jalur non-kekerasan dalam menyelesaikan konflik (dikutip dalam Rusdi, 2012, p. 390).

Kompas.com sendiri dipilih karena selain berada di daftar 10 portal berita daring yang paling sering diakses menurut Alexa, Kompas.com memiliki ideologi humanisme (Afifah, 2014, p. 87). Dalam studi yang dilakukan oleh Afifah (2014) terhadap Kompas.com dan Republika Online di dalam pemberitaannya pada peristiwa ledakan di Vihara Ekayana, hasil studi tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com cenderung mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam membuat berita. Penulis ingin menganalisis penerapan jurnalisme damai pada media berideologi humanisme pada pemberitaan konflik Papua.

Dengan metode analisis isi kuantitatif, penulis akan melakukan analisis terhadap teks berita tentang konflik di Papua pada periode 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2016 pada portal berita *Kompas.com*. Hasil analisis tersebut kemudian akan dianalisis kembali berdasarkan empat orientasi konsep jurnalisme damai atau perang menurut Johan Galtung.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dapat disimpulkan yakni, apakah pemberitaan di *Kompas.com* pada konflik di Papua pada periode 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2016 sudah memenuhi prinsip dari jurnalisme damai, dan bagaimana frekuensi penerapan jurnalisme damai dalam pemberitaan konflik di Papua pada periode 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2016?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis membuat beberapa pertanyaan penelitian yakni:

1. Apakah pemberitaan *Kompas.com* dalam konflik Papua periode 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2016 menerapkan prinsip jurnalisme damai?
2. Bagaimana frekuensi penerapan jurnalisme damai dalam pemberitaan *Kompas.com* pada konflik di Papua periode 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penulis menetapkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kompas.com menerapkan prinsip jurnalisme damai pada pemberitaan konflik di Papua periode 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2016 dan bagaimana frekuensi penerapannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis membagi manfaat penelitian ini menjadi tiga, yakni:

a. Manfaat Akademis

Data dalam penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian mengenai jurnalisme damai pada berita di Kompas.com secara keseluruhan, maupun penelitian dengan perspektif jurnalisme damai pada konflik di Papua periode 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2016 dengan Kompas.com sebagai salah satu pihak yang akan dikomparasikan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada studi mengenai jurnalisme damai dalam pemberitaan konflik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lain untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan jurnalisme damai.

b. Manfaat Praktis

Berfungsi menjadi data evaluasi bagi jurnalis, khususnya jurnalis Kompas.com dalam menerapkan prinsip jurnalisme damai. Penelitian ini

diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan praktisi media dalam melakukan peliputan sebuah konflik, untuk lebih cenderung menerapkan prinsip jurnalisme damai dalam berita yang diproduksi.

c. Manfaat Sosial

Memberikan pengetahuan tentang apa jurnalisme damai, bagaimana melihat sebuah berita dari perspektif tersebut dan bagaimana peran jurnalisme damai dan jurnalisme perang dalam sebuah konflik, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sikap media seharusnya dalam peliputan sebuah konflik.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini pada beberapa kriteria yakni:

1. Penulis hanya meneliti objek yang merupakan berita dari Kompas.com tentang konflik di Papua periode 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2016.
2. Penulis membatasi metode analisis hanya dengan model analisis isi kuantitatif, dengan konsep jurnalisme damai Johan Galtung.
3. Penulis memiliki batasan waktu dalam pengerjaan penelitian sebagaimana ditetapkan oleh pihak Universitas Multimedia Nusantara, dengan batas waktu maksimal 4 bulan.